

## ABSTRAK PERATURAN DAERAH

KEARSIPAN

2022

PERDA NO. 9, LD 2022/NO.9 THN 2022, 45 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

**ABSTRAK :** - Kearsipan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dalam upaya mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat, arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan dan bahan pembelajaran bagi masyarakat. Di samping fungsi pelayanan publik, arsip memiliki fungsi administrasi, legal, finansial, riset, edukasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah, BUMD dan Masyarakat perlu melaksanakan pengelolaan arsip yang tercipta sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan tertib administrasi tersebut dengan melalui penyediaan data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu didukung dengan tata kelola yang andal dan ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan. Bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan kearsipan sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang

Peraturan Daerah ini mengatur Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah, BUMD dan Masyarakat, yang meliputi: a. penyelenggaraan kearsipan daerah; b. penetapan kebijakan kearsipan; c. pembinaan kearsipan; d. pengelolaan arsip; e. SIKK dan JIKK; f. sumber daya pendukung; g. peran serta masyarakat; h. kerjasama daerah; i. pengawasan dan pengendalian; j. ketentuan pidana.

**CATATAN :** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 November 2022.

- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusutan yang meliputi pelaksanaan pemindahan arsip, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis di atur dalam Peraturan Bupati.